

KILAS KEBIJAKAN PSPK

Peningkatan Partisipasi: Peluang Pengembangan PPDB Bersama di DKI Jakarta

Faris H. Makarim, Mandira B. Elmir, Nisa Felicia

Pendahuluan

Masuk ke sekolah yang murah dan berkualitas adalah keinginan anak-anak Indonesia yang juga sangat didukung oleh orang tua mereka. Di DKI Jakarta, mayoritas anak berlomba-lomba untuk dapat masuk ke sekolah negeri, terutama sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya gratis, tetapi juga memiliki alumni-alumni yang berhasil masuk ke sekolah atau perguruan tinggi unggulan. Konsep sekolah unggulan ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan kualitas pendidikan untuk semua sehingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan berbagai usaha untuk menghapuskan konsep tersebut. Meskipun konsep sekolah unggulan perlahan memudar, sekolah negeri secara umum masih menjadi primadona karena tidak membutuhkan masyarakat untuk mengeluarkan biaya.

Tingginya minat ini menjadi penyebab ketatnya kompetisi anak untuk dapat masuk sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. Pada 2021, SMP Negeri hanya dapat menampung **47.33%** lulusan SD di Jakarta, sementara SMA Negeri dan SMK Negeri hanya dapat menampung **33.66%** lulusan SMP¹. Hal ini merupakan kabar yang kurang membahagiakan bagi anak-anak yang paling rentan secara ekonomi. Jika mereka tidak berhasil masuk ke sekolah negeri, opsi paling realistis bagi mereka hanyalah masuk ke sekolah swasta yang berkualitas kurang baik.

Pada PPDB jenjang SMA pada tahun 2021, terdapat **14.379**² siswa SMP kelas 9 paling rentan secara ekonomi, yaitu penerima KJP sekaligus KIP, yang baru lulus. Namun, hanya terdapat **10.400**³ bangku kosong di SMA Negeri. Bangku kosong tersebut juga tidak semuanya dapat dialokasikan untuk anak-anak paling rentan secara khusus demi keadilan akses bagi anak dari seluruh golongan. Anak-anak paling rentan tersebut dapat masuk ke SMA Negeri lewat jalur zonasi. Namun, persebaran sekolah di DKI Jakarta tidak merata. Dari **267** kelurahan, terdapat **168**⁴ kelurahan yang tidak memiliki SMA Negeri sehingga anak-anak yang memiliki tempat tinggal di kelurahan tanpa SMA tersebut memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk lolos PPDB jalur zonasi.

PPDB Bersama adalah usaha Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan kalau anak-anak paling rentan di Jakarta mendapatkan sekolah gratis yang berkualitas walaupun sekolah negeri tidak memiliki daya tampung yang memadai. Dinas Pendidikan DKI Jakarta melibatkan **89** sekolah swasta untuk ikut serta dalam sistem PPDB yang hanya bisa diikuti oleh anak-anak paling rentan. Pemerintah provinsi memberikan dana dengan jumlah tertentu kepada sekolah dengan catatan sekolah tidak diperkenankan menarik biaya apapun dari siswa yang diterima.

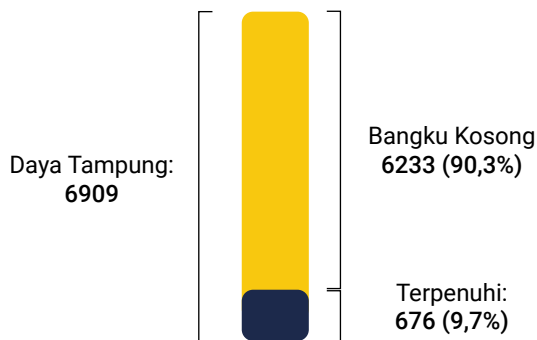
¹Azzahra, Tiara. (2021, 7 Juni). PPDB DKI Dibuka Hari Ini, Daya Tampung Sekolah Negeri di Bawah 50 Persen. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5595968/ppdb-dki-dibuka-hari-ini-daya-tampung-sekolah-negeri-di-bawah-50-persen>.

²Sumber: data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

³Diakses 10 Mei 2021. Sekolah & Daya Tampung. PPDB Online. https://arsip.siap-ppdb.com/2017/jakarta/?force_desktop=1#/030001/pagu.

⁴Wahyudi, Nyoman. (2021, 7 Juni). PPDB 2021 Online Jakarta Dimulai, Berikut Jalur dan Daya Tampung SMP/SMA Negeri. Jakarta Bisnis. <https://jakarta.bisnis.com/read/20210607/77/1402088/ppdb-2021-online-jakarta-dimulai-berikut-jalur-dan-daya-tampung-smptsma-negeri>.

Hasil PPDB Bersama 2021

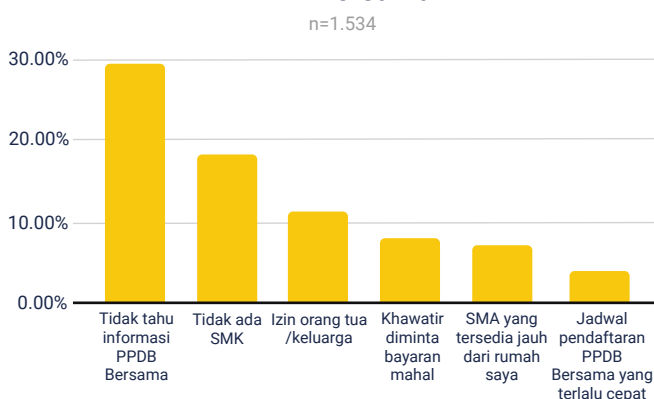


Inisiatif ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk melindungi anak-anak paling rentan di ibu kota. Selain itu, PPDB Bersama adalah bentuk pelibatan masyarakat untuk sama-sama berkontribusi untuk pendidikan. Dari 6.909 daya tampung dari seluruh sekolah swasta, hanya 676 siswa paling rentan yang diterima sedangkan ada 6.233 bangku kosong. Fenomena ini menandakan bahwa masih banyak peluang bagi Dinas Pendidikan untuk mengembangkan program ini menjadi lebih baik lagi.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi target program. Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dan penyebaran kuesioner daring dilaksanakan dengan target responden anak-anak yang dapat mengikuti PPDB Bersama 2021, yaitu siswa penerima KJP dan KIP kelas 10 yang tidak diterima PPDB di sekolah negeri. Responden terbagi menjadi dua kelompok, yaitu siswa yang mengikuti PPDB Bersama dan masuk ke sekolah swasta serta siswa yang tidak mengikuti PPDB Bersama.

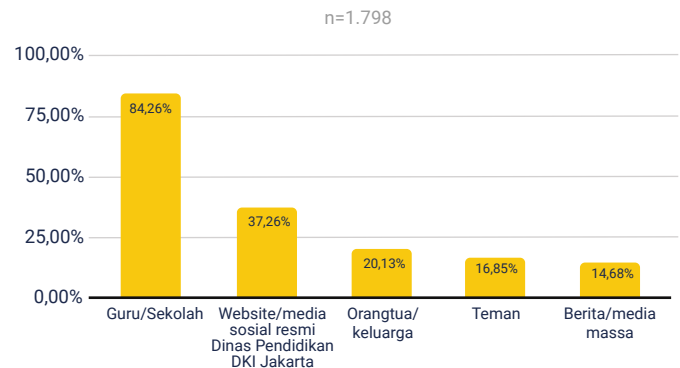
Perlunya Penyebaran Informasi yang Lebih Lama dan Melibatkan Berbagai Pihak

Apa yang membuat kamu tidak mendaftar PPDB Bersama?



Alasan dominan dari responden yang membuat mereka tidak mendaftar PPDB Bersama adalah karena ketidaktahuan mereka terkait informasi PPDB Bersama (29.22%). Pada DKT, 4 dari 9 responden yang tidak mendaftar PPDB Bersama mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi PPDB Bersama. Selain itu, dari 13 responden yang mengikuti PPDB Bersama, 7 anak mengaku tidak mengetahui PPDB Bersama, tetapi mereka didaftarkan oleh orang tua atau guru mereka.

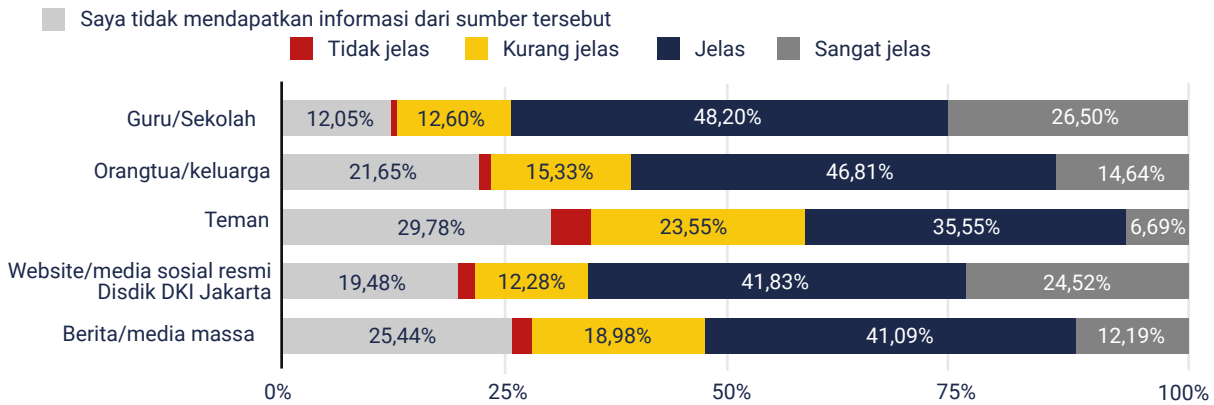
Darimana Kamu mendapatkan informasi tentang PPDB Bersama?



Praktik baik sosialisasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah dengan menarget sekolah-sekolah. Dari total 22 responden DKT, seluruh anak yang mengetahui PPDB Bersama (11 responden) mendapatkan informasi dari guru atau pihak sekolah. Mayoritas responden kuesioner daring yang mengetahui informasi PPDB Bersama ternyata mendapatkan informasi dari guru atau pihak sekolah (84.26%), angka tersebut jauh lebih tinggi dari sumber informasi website/media sosial resmi yang hanya menyampaikan informasi kepada 37.26% responden.

Seberapa jelas informasi PPDB Bersama yang kamu dapatkan dari sumber tersebut

n=2.166

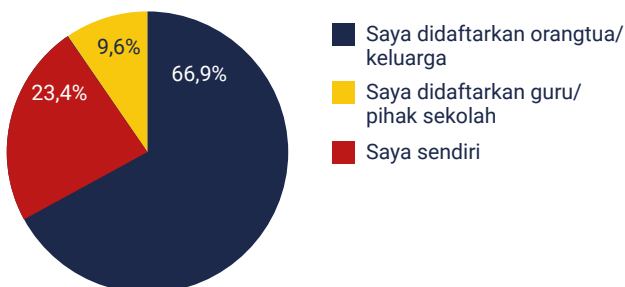


Sumber informasi paling jelas untuk menyampaikan informasi PPDB Bersama adalah lewat guru/sekolah dengan nilai 74.70%, disusul dengan website/media sosial (66.35%), dan orang tua/keluarga (61.45%).

Temuan yang menarik adalah bahwa hanya 23.4% pendaftar PPDB Bersama yang mendaftarkan dirinya sendiri. 66.9% didaftarkan orang tua/keluarga dan 9.6% didaftarkan oleh guru/sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua/keluarga memiliki peran sentral dalam pendaftaran anak pada PPDB Bersama. Maka dari itu, orang tua/keluarga perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang PPDB Bersama.

Siapa yang mendaftarkan kamu di PPDB Bersama?

n=632



Hal yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada PPDB Bersama 2022 adalah:

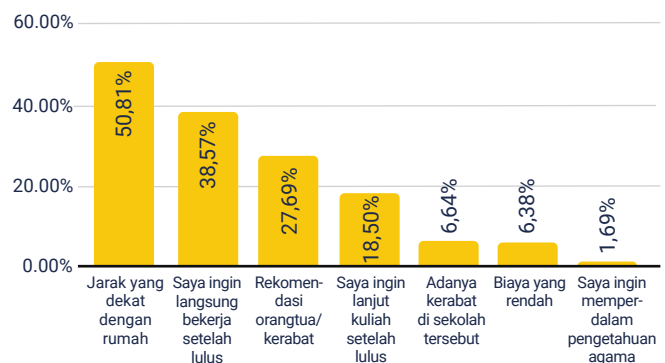
1. Melakukan penggabungan petunjuk teknis PPDB Bersama dengan PPDB ke sekolah negeri
2. Melakukan sosialisasi paling lama dua bulan sebelum PPDB Bersama dimulai
3. Melibatkan sekolah, khususnya SMP negeri dan swasta yang memiliki banyak siswa penerima KJP dan KIP, sebagai agen sosialisasi utama
4. Menargetkan orang tua siswa dan siswa penerima KJP dan KIP sebagai target sosialisasi utama

Pemilihan Lokasi Sekolah Swasta yang Dekat Dengan Pusat Kepadatan Anak Rentan

Dari 9 responden DKT yang tidak mendaftar PPDB Bersama, 8 responden mengatakan bahwa mereka memilih sekolah dengan jarak terdekat dari rumah mereka. Beberapa responden DKT yang mendaftar PPDB Bersama juga mengatakan bahwa alasan mereka memilih sekolah swasta tersebut adalah karena kedekatan dengan rumah mereka.

Alasan kamu dalam memilih sekolahmu sekarang?

n=1.534



Mayoritas responden yang tidak mendaftar PPDB Bersama memilih sekolahnya dengan kriteria jarak terdekat dengan rumah (50.81%) Hal ini berkaitan dengan kondisi ekonomi dari keluarga responden yang akan terbebani ketika anak harus mengeluarkan ongkos transportasi seperti kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Anak lebih memilih untuk jalan kaki ke sekolah agar dapat melakukan penghematan ekonomi. Maka dari itu, sekolah yang jauh akan memberatkan anak-anak yang paling rentan secara ekonomi.

"Orang tua bilang terserah sekolah ke mana aja yang penting dekat, enggak terlalu jauh, Supaya enggak capek dan enggak ngeluh."

Siswa SMK di Jakarta yang tidak memilih PPDB Bersama

Sekolah yang berpartisipasi di PPDB Bersama adalah SMA Negeri yang memiliki indeks kualitas menengah dan berada di kelurahan yang tidak memiliki SMA Negeri (168 kelurahan). Sebabnya adalah untuk menanggulangi seleksi zonasi yang kurang dianggap adil bagi siswa-siswa di kelurahan-kelurahan tersebut.

Namun, mekanisme pemilihan sekolah tersebut tidak sinkron dengan jalur zonasi. Walaupun jalur zonasi direncanakan memakai seleksi jarak, pada kenyataannya ada 86.2% siswa yang masuk SMA Negeri dengan seleksi usia karena mereka berada pada zonasi prioritas 3 dari SMA yang mereka daftar. Dengan begitu, ada kemungkinan siswa-siswi yang berada di kelurahan tanpa SMA Negeri masuk ke SMA Negeri di kelurahan sebelahnya, yang sebenarnya tidak mungkin terjadi jika seleksi dilakukan memakai jarak. Hal ini yang membuat banyaknya bangku kosong di SMA Swasta pada PPDB Bersama.

Selain itu, pemilihan sekolah swasta tidak memper-timbangkan kepadatan siswa penerima KJP dan KIP. Kelurahan tanpa SMA Negeri bisa jadi juga memiliki sedikit siswa target sementara kelurahan yang memiliki SMA Negeri bisa jadi memiliki jumlah siswa target yang sangat banyak dan tidak dapat tertampung sepenuhnya di SMA Negeri yang ada di kelurahan tersebut.

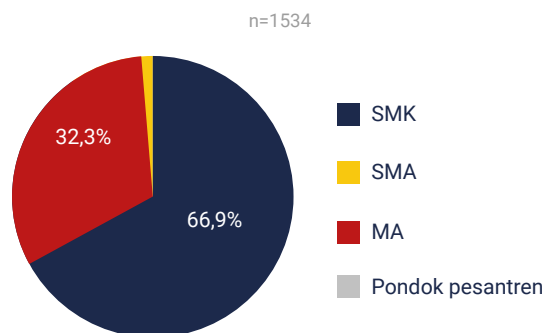
Hal yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada PPDB Bersama 2022 adalah:

1. Melakukan penyempurnaan jalur zonasi agar terjadi seleksi berdasarkan jarak. Dengan begitu, kita dapat memprediksikan jumlah dan lokasi anak paling rentan yang tersisa
2. Memilih sekolah swasta pada lokasi-lokasi dengan kepadatan siswa paling rentan yang tinggi dan belum tertampung di SMA Negeri
3. Membuka peluang untuk seluruh SMA Swasta untuk mengajukan diri dengan catatan mereka perlu mempertimbangkan jumlah anak paling rentan di sekitar daerah sekolah tersebut

Pelibatan SMK dalam PPDB Bersama

Pada dasarnya, setiap anak dapat memilih apakah mereka ingin melanjutkan studi di SMA, SMK, atau sekolah jenis lain yang sederajat. PPDB Bersama hanya melibatkan SMA Negeri karena masalah yang ingin diselesaikan adalah kurangnya jumlah SMA Negeri di Jakarta yang membuat anak-anak di kelurahan tertentu tidak memiliki kesempatan untuk masuk SMA Negeri pada jalur zonasi. Hal tersebut tidak adil karena anak tidak dapat memilih di mana mereka akan dilahirkan. Dengan memilih SMA Negeri di antara 168 kelurahan tersebut, masalah keadilan di jalur zonasi untuk anak-anak paling rentan sudah teratasi. Namun, pendidikan yang gratis dan berkualitas untuk anak-anak paling rentan di Jakarta belum diberikan secara menyeluruh.

Sekolah apa yang menjadi pilihan utama kamu?



Pada DKT, seluruh anak yang tidak mendaftar PPDB Bersama (9 responden) sedang bersekolah di SMK. Fenomena ini disebabkan karena mereka memiliki harapan untuk langsung bekerja setelah lulus SMK (5 dari 9 responden). Menurut kuesioner daring, alasan kedua terbesar yang membuat responden tidak mendaftar PPDB Bersama adalah karena tidak ada pilihan SMK (18.20%). Selain itu, terdapat 66.9% responden kuesioner daring (yang tidak mendaftar PPDB Bersama) yang mengatakan bahwa pilihan utama mereka adalah SMK dibandingkan SMA, MA, atau pondok pesantren.

"Enggak sempet ngelirik SMA karena minatnya SMK. Karena akan cepat dapat kerja, bisa fleksibel kerja/kuliah juga."

Siswi SMK di Jakarta yang tidak memilih PPDB Bersama

Maka dari itu, hal yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada PPDB Bersama 2022 adalah dengan memasukkan SMK Swasta pada PPDB Bersama.

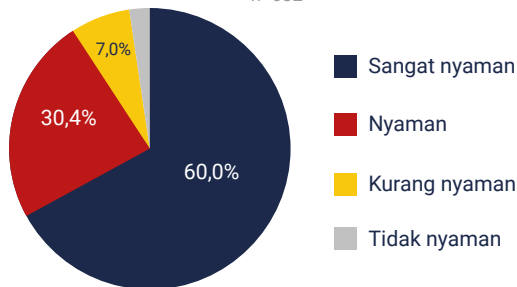
Rendahnya Partisipasi Tidak Berhubungan dengan Ketidaknyamanan Bersekolah di Swasta

Saat PPDB Bersama pertama kali direncanakan, ada kekhawatiran kalau anak-anak yang masuk SMA Swasta akan merasa tidak nyaman dengan pergaulan, interaksi dengan guru, maupun tingkat kesulitan dalam belajar di SMA Swasta. Hal-hal ini yang diprediksikan mengurangi jumlah pendaftar PPDB Bersama.

Namun, dari DKT yang dilakukan kepada 9 anak yang tidak mendaftar PPDB Bersama, seluruh responden tidak merasa faktor-faktor tersebut mempengaruhi keputusan mereka untuk tidak mendaftar PPDB Bersama.

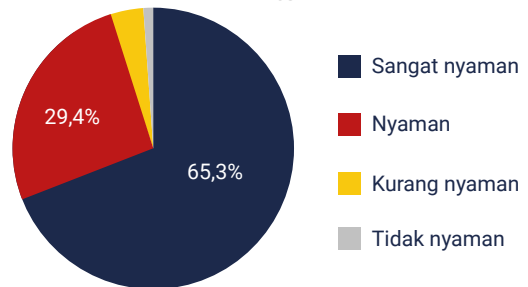
Seberapa nyaman pergaulan Anda dengan teman-teman di SMA kamu sekarang?

n=632



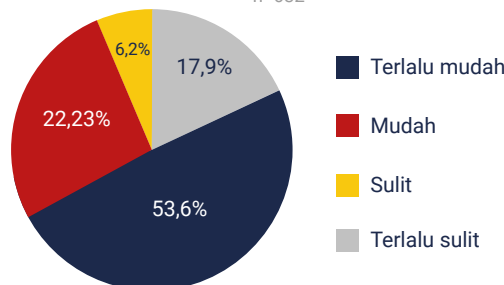
Seberapa nyaman kamu dengan perlakuan guru di sekolah?

n=632



Seberapa mudah kamu dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah?

n=632



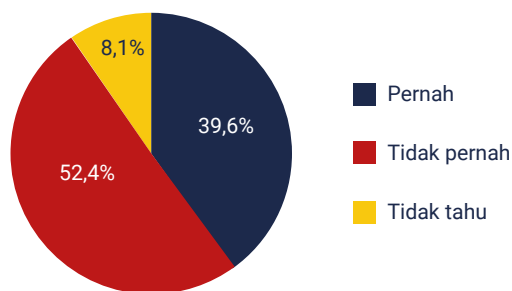
Pada kuesioner daring, 90.4% responden nyaman dengan pergaulan dan 94.7% responden nyaman dengan perlakuan guru di SMA Swasta. Selain itu, 70.5% responden merasa mudah dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa pergaulan, perlakuan guru, maupun kesulitan belajar di sekolah tidak berpengaruh terhadap keputusan memilih PPDB Bersama ataupun kenyamanan siswa PPDB Bersama di sekolah.

Tindakan Tegas Kepada Sekolah Swasta yang Menarik Biaya

Kekhawatiran lain yang muncul saat perencanaan program adalah partisipasi rendah yang disebabkan karena anak-anak penerima KJP dan KIP tidak tahu bahwa mereka tidak perlu bayar sehingga takut untuk mendaftar PPDB Bersama. Pada kenyataannya, tidak ada responden DKT yang mengatakan bahwa mereka takut diminta bayaran yang mahal. Responden lebih mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah dan apakah sekolah tersebut SMA atau SMK.

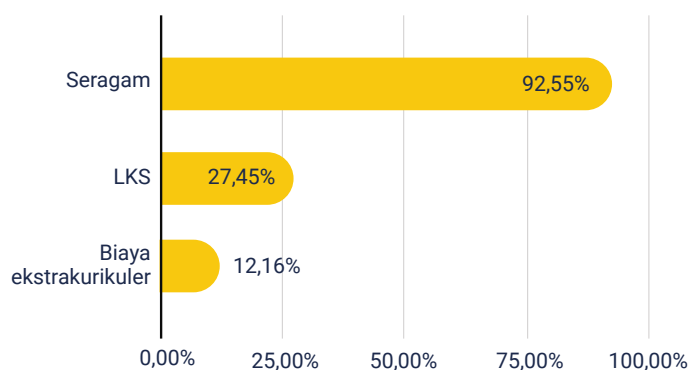
Apakah sekolah pernah menarik suatu biaya tertentu kepada kamu?

n=632



Jika pernah, dalam bentuk apa?

n=250



Namun, ada 39.6% responden terdaftar di sekolah swasta PPDB Bersama mengaku sekolah mereka pernah menarik biaya tertentu pada mereka. Mayoritas penarikan dana tersebut (92.55%) adalah biaya seragam. Padahal sekolah swasta sudah diberikan pendanaan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta sejumlah siswa yang masuk ke sekolah mereka melalui PPDB Bersama dan sekolah tersebut tidak boleh menarik pembiayaan apapun. Kejadian ini dapat menjadi preseden buruk bagi PPDB Bersama di tahun 2022 dan akan menjadi kekhawatiran calon peserta didik yang berpotensi menurunkan partisipasi.

Hal yang bisa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah:

1. Mengomunikasikan, menegaskan, dan memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah swasta yang melakukan penarikan biaya.
2. Membuat sistem di mana siswa dapat mengirimkan pengaduan secara langsung kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara aman.

Kesimpulan

Pada PPDB Bersama DKI Jakarta tahun 2021, hanya 676 bangku yang terisi dari total kapasitas 6.909. Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penelitian dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun dan penyebaran kuesioner daring dengan temuan-temuan serta rekomendasi sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi
1	Kurangnya penyebaran informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penggabungan petunjuk teknis PPDB Bersama dengan PPDB ke sekolah negeri 2. Melakukan sosialisasi paling lama dua bulan sebelum PPDB Bersama dimulai 3. Melibatkan sekolah, khususnya SMP negeri dan swasta yang memiliki banyak siswa penerima KJP dan KIP, sebagai agen sosialisasi utama 4. Menargetkan orang tua siswa dan siswa penerima KJP dan KIP sebagai target sosialisasi utama
2	Kurang tepatnya pemilihan lokasi sekolah swasta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan jalur zonasi sehingga terjadi seleksi berdasarkan jarak. Dengan begitu, kita dapat memprediksikan jumlah dan lokasi anak paling rentan yang tersisa 2. Memilih sekolah swasta pada lokasi-lokasi dengan kepadatan siswa paling rentan yang tinggi dan belum tertampung di SMA Negeri 3. Membuka peluang untuk seluruh SMA Swasta untuk mengajukan diri dengan catatan mereka perlu mempertimbangkan jumlah anak paling rentan di sekitar daerah sekolah tersebut

No	Temuan	Rekomendasi
3	Lebih tertariknya minat siswa penerima KJP dan KIP terhadap SMK daripada SMA	Memasukkan SMK Swasta pada PPDB Bersama
4	Rendahnya partisipasi tidak berhubungan dengan ketidaknyamanan bersekolah di swasta	Tidak perlu mempertimbangkan aspek ketidaknyamanan siswa dalam pembuatan kebijakan PPDB Bersama
5	Keberadaan sekolah swasta yang menarik biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengomunikasikan, menegaskan, dan memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah swasta yang melakukan penarikan biaya 2. Membuat sistem di mana siswa dapat mengirimkan pengaduan secara langsung kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara aman